



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Pembayaran SPH Tunggu TGR

KEPAHIANG - Meski mengakui akan melakukan pembayaran Surat Pengakuan Hutang (SPH) atas pembangunan waterpark tahun anggaran 2021 sebesar Rp 3,2 miliar, namun Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang belum bisa merealisasikannya dalam waktu dekat. Menurut Kepala Disparpora Kabupaten Kepahiang, Tedy Adeba, ST, berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, pembangunan tahap I waterpark tersebut memunculkan sejumlah temuan yang mengharuskan pihaknya membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

"SPH tetap akan kita bayarkan, rencananya di pertengahan tahun ini kita bayarkan. Namun belum bisa dipastikan kapan, masih menunggu berapa nominal TGR kita dari hasil audit BPK beberapa waktu lalu," terang Tedy.

Ditanya berapa nominal TGR yang harus dibayarkan Disparpora tahun ini, Tedy mengaku belum mengetahui secara pasti. Pasalnya audit yang dilakukan BPK baru saja selesai dua pekan lalu. Pihaknya belum menerima salinan dari hasil audit tersebut.

"Yang jelas kita ada TGR, namun belum tahu berapa nominalnya. Untuk pembayaran TGR itu nantinya akan kita potong saja dari SPH yang ada," sampainya.

Lebih lanjut ditanya mengenai pembangunan tahap II waterpark di Desa Air Sempiang Kecamatan Kabawetan, Tedy belum bisa memastikan. Alasannya masih menunggu kejelasan dari wacana pinjaman daerah Pemkab Kepahiang ke Bank Bengkulu. Usulan tersebut saat ini masih di meja Mendagri dan Menkeu untuk dipelajari lebih lanjut.

"Karena belum ada rekomendasi dari Mendagri dan Menkeu, jadi belum bisa dipastikan berapa pinjaman daerah yang akan diakomodir," tukasnya.

Disisi lain, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepahiang, Ansori, M meminta kepada Pemkab Kepahiang untuk menjemput bola mencari kejelasan atas rencana pinjaman daerah. Pasalnya usulan pinjaman daerah berdampak pada beberapa pembangunan inti yang akan dilakukan oleh Pemkab Kepahiang.

"Pemkab harus jemput bola terkait kejelasan